



KEPENTINGAN INGGRIS DALAM MEMERANGI *ILLEGAL LOGGING* MELALUI PROGRAM *MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME* DI INDONESIA.

Salsabilla Amanda, Hermi Susiatiningsih, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

UK is one of the countries that requires wood for the purpose of using both for structural and non-structural buildings. The high demand for wood has forced UK to ask Indonesia to continue to supply its wood needs. However, illegal logging has become a problem for the forestry sector in Indonesia which has caused many losses, ranging from the unstable timber market industry, the deteriorating economy, and the increasingly unsustainable state of the forest. This made the UK formulate a foreign policy for Indonesia by creating a cooperation scheme through the Multistakeholder Forestry Program. Based on this, the author aims to explain the UK's interest in establishing cooperation with Indonesia through the Multistakeholder Forestry Program in combating Illegal Logging. This paper will focus to explain and analyze the cooperation formed between UK and Indonesia in minimizing the illegal timber trade. This study uses qualitative methods with data collection through secondary sources. This study uses the theory of Neoclassical Realism by looking at the internal and external factors of the UK. The results of this study indicate that the cooperation between the UK and Indonesia has been able to improve forest governance in Indonesia and the UK can easily obtain legal and safe timber.

Keywords: *Illegal Logging, Cooperation, MFP, Indonesia, UK.*

PENDAHULUAN

Inggris menjadi negara yang mengonsumsi sekitar 500.000 m³ kayu (Greenslade, 2020). Diketahui, Inggris menempati posisi sebagai negara keempat terbesar yang mengimpor kayu dari luar negeri setelah Jepang, China, dan Amerika Serikat. Inggris pun menempati posisi sebagai mitra importir dalam perdagangan kayu bagi Indonesia (Bisnis, 2020). Namun, seiring berjalannya waktu Indonesia memiliki kesulitan atas pasokan bahan baku kayu, dimana industri kehutanan Indonesia banyak menggunakan pasokan kayu yang diperoleh dari *Illegal Logging*. Hal ini menimbulkan permasalahan dilematis bagi Inggris mengenai produksi kayu-kayu Indonesia yang akan dikonsumsi oleh Inggris. Untuk itu, Inggris memberikan dukungan untuk memperkuat tata laksana sektor kehutanan di Indonesia. Inggris membentuk suatu integrasi yang lebih dalam, dengan menjalin kerjasama dengan Indonesia yang berfokus pada Program Kerjasama Kehutanan melalui *Multistakeholder Forestry Programme* (MFP) tahun 2000 (MFP, 2000). Penandatanganan perjanjian kerjasama fase ke-4 telah disepakati oleh kedua pihak pada

3 September 2018 agar melanjutkan pertumbuhan dalam bisnis hutan berbasis masyarakat (KLHK, 2018). Melalui pemerintah Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), MFP menjadi pilar penting bagi Indonesia serta guna menjadi kontribusi penuh bagi Inggris untuk bekerjasama dengan Indonesia mengatasi persoalan *Illegal Logging* agar lebih maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa Inggris berusaha membentuk kerjasama dengan Indonesia dalam memerangi *Illegal Logging* melalui dorongan MFP dari fase 1 sampai fase 4 yang diperpanjang kembali. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjawab kerjasama Inggris yang ditujukan untuk negara Indonesia melalui MFP fase 1 sampai fase 4 untuk menghadapi permasalahan lingkungan utamanya pada kasus *Illegal Logging* di Indonesia.

Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan Teori Realisme Neoklasik. Teori Realisme Neoklasik muncul sebagai kepanjangan dari teori Realisme sebagai penyempurna agar semakin kompleks. Realisme Neoklasik hadir sebagai penggabungan elemen dari Neorealisme dan Realisme Klasik. Teori Realisme Neoklasik dikenal secara signifikan pada tahun 1998 tepatnya dicetuskan oleh pernyataan Gideon Rose pada bukunya yang berjudul “*Neoclassical Realism and Theory of Foreign Policy*”. Realisme neoklasik menjadi suatu perspektif yang menjembatani antara sistem internasional (faktor eksternal) dan situasi domestik (faktor internal) dan adanya interaksi kompleks yang dilakukan dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Dengan demikian, perspektif ini memunculkan gagasan bahwa pentingnya merumuskan suatu kebijakan yang didasarkan pada kepentingan nasional negara.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam membahas mengenai kerjasama Indonesia-Inggris dalam mengatasi persoalan *Illegal Logging*. Penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik yang dibahas adalah penelitian pertama dilakukan oleh Mia Risa Himalia (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Analisa Bantuan Luar Negeri Inggris dalam Skema Kerjasama *Multistakeholder Forestry Programme 3* di Jepara.”, menjelaskan mengenai terjadinya *Illegal Logging* di Jepara sehingga Inggris yang menganut norma domestik membentuk Kerjasama dengan Inggris melalui MFP di Jepara. Lalu, penelitian kedua dituliskan oleh Antoko Ridho (2019) dengan judul “Implementasi kerjasama Indonesia-Inggris dalam kerangka *Multistakeholder Forestry Programme 3* (MFP 3) terhadap peningkatan produk kayu Indonesia”, membahas mengenai kebijakan penegakan hukum dan tata kelola hutan serta implementasi kerjasama Indonesia-Inggris kerangka MFP fase 3 untuk meningkatkan produk-produk kayu Indonesia bebas dari *Illegal Logging*. Sehingga, penelitian yang berfokus membahas kepentingan Inggris dalam memerangi *Illegal Logging* di Indonesia melalui program MFP fase 4 masih belum begitu banyak dijumpai dikarenakan program ini baru kembali diperpanjang tahun 2018.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya untuk memahami lebih jauh bagaimana kepentingan Inggris dalam kerjasama yang telah berlangsung sejak MFP fase 1 sampai MFP fase 4 di Indonesia. Penulis mencoba mengisi kekosongan pada penelitian terdahulu dengan menggali kepentingan Inggris dengan menggunakan teori Realisme Neoklasik sebagai sebuah metode yang baru untuk memahami fenomena kerjasama ini. Sebagaimana kerjasama MFP Indonesia Inggris banyak dimaknai melalui pendekatan Konstruktivisme oleh karenanya, menarik untuk digali lebih jauh apakah kepentingan Inggris dalam MFP merupakan bentuk keadaan domestik dan sistem internasional yang identik melekat pada Realisme Neoklasik. Penelitian ini memberikan argument bahwa Kebijakan Luar negeri melalui program kerjasama ini menjadi langkah yang dirancangkan oleh Inggris agar terus mengatasi

Illegal Logging dan memaksimalkan produksi komoditi kayu di Indonesia sebagaimana upaya mempertahankan kepentingan Inggris dalam mempromosikan perdagangan komoditas yang legal dan terciptanya hutan lestari. Oleh karena itu, menggunakan teori Realisme Neoklasik penelitian ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait kepentingan yang melatarbelakangi Inggris memberikan kerjasama bagi permasalahan lingkungan utamanya *Illegal Logging* di Indonesia.

PEMBAHASAN

Industri Inggris menggunakan setidaknya 50 juta ton kayu per tahun untuk dapat memenuhi volume yang dikonsumsi. Inggris memiliki sekitar 60% produk kayu, sementara sebagian memilih untuk mengimpor produk hutan (Commission, 2020). Meningkatnya permintaan industri kayu Inggris, membuat negara Inggris tidak lagi dapat memproduksi kayu yang cukup untuk memenuhi permintaannya. Negara tersebut harus mengimpor sekitar 80% kayu dari luar negeri. Mengingat kebutuhan Inggris akan kayu yang sangat besar, Indonesia telah menjadi peluang besar bagi Inggris karena telah menguasai pasar jual beli kayu di dunia. Selain itu, melalui penyelenggaraan webinar yang mewakili asosiasi bisnis dari Indonesia dan Inggris yakni *United Kingdom Market, Indonesia's Timber for FLEGT Timber Product: Indonesia's Timber as Sustainable Partner for UK Market* (Bisnis E. , 2020). Indonesia berhasil meyakinkan pasar global bahwa produk kayu yang dihasilkan oleh Indonesia berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan. *Minister of State for Pacific and Environment* pihak Inggris juga mengungkapkan bahwa kayu yang berasal dari Indonesia dapat memudahkan konsumen Inggris melakukan *sourcing* kayu berkelanjutan. Maka dari itu, Inggris tertarik dan menyukai hasil produk kayu yang dihasilkan oleh Indonesia sebab kayu Indonesia memiliki *story value*.

Seiring meningkatnya konsumen Inggris yang mengharapkan jaminan produk kayu Indonesia yang dibeli, industri kehutanan kayu di Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan deforestasi akibat munculnya permasalahan *Illegal Logging*. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, penyebab utama kehilangan hutan primer akibat adanya deforestasi yang didorong oleh maraknya *Illegal Logging*. Selain kebakaran hutan, *Illegal Logging* membuat sebab utama pengikisan dan kerusakan hutan. Kasus *Illegal Logging* di Indonesia memuat 607 kasus, di tahun 2021 mencapai angka sebesar 110 kasus (DitjenPHLHK, 2021).

Pemerintah Inggris menyikapi proses penegakan hukum dan Tata Kelola Hutan melalui *Memorandum of Understanding* (Mou) dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi *Illegal Logging* di negara tersebut. Dalam menyikapi *Illegal Logging* di Indonesia, hubungan bilateral antara Indonesia-Inggris di sektor kehutanan dimulai dari landasan kebijakan Uni Eropa yang telah meluncurkan inisiatif melalui aksi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement* FLEGT-VPA menjadi aspek dasar dalam menangani pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Model yang dirancang adalah merumuskan dukungan melalui SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang menjadi inisiasi diakui secara hukum dalam menerapkan sistem pelacakan pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Berkat SVLK yang diberlakukan, hal ini membuka pasar Inggris untuk mengimpor kayu yang berasal dari Indonesia. Inisiasi pertama program kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi persoalan pembalakan liar beserta pengelolaan hutan produksi adalah dengan meluncurkan MFP. Sejauh ini, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang

memenuhi syarat untuk mendapatkan akses istimewa ke pasar Uni Eropa senilai \$1 miliar per tahun dan pasar Inggris senilai £200 juta per tahunnya (Shofa, 2021).

Inggris menjalin kerjasama dengan Indonesia yang berfokus pada masalah lingkungan kerjasama yang ditandai dengan disepakatinya *Letter of Agreement* yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2000. Dengan demikian, kerjasama ini diberi nama *Multistakeholder Forestry Programme*. Latar belakang adanya kerjasama ini pada awalnya pihak Inggris melalui *United Kingdom Department for International Development* (UK-DFID) memberikan dukungan kepada Indonesia untuk memperkuat tata hukum dan laksana sektor kehutanan yang berhasil direalisasikan melalui kerjasama MFP. Sejak tahun 2000, MFP telah mendukung Indonesia untuk memperkuat tata kelola hutan dalam mengatasi pembalakan liar (KEMLU, 2020). Program MFP diawali pada Oktober tahun 2000-2006, dimana berawal dari dialog multipihak dalam mengembangkan standar legalitas kayu dan mempercepat reformasi di bidang kehutanan (FORDA, 2011). Keberhasilan pada MFP fase pertama telah melanjutkan program fase kedua berjalan dari tahun 2007-2014. MFP fase ketiga kembali dilanjutkan dari tahun 2014-2017 guna memastikan seluruh komponen SVLK telah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Hingga kolaborasi kerjasama Indonesia – Inggris melalui MFP telah memasuki fase keempat. Komitmen kerjasama antara kedua belah pihak diawali dengan penandatanganan oleh Ketua *UK's Climate Change Unit*, Tom Owen-Edmunds serta Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Hilman Nugroho mewakili Menteri KLHK dan pada 3 September 2018 (KLHK, 2018). Program ini tengah berjalan sejak 2018-2021 dengan melaksanakan dua mandat utama yakni pengembangan bisnis hutan kemasyarakatan dan peningkatan perdagangan produk kayu olahan legal, lestari dan yang ramah lingkungan. Strategi yang dilakukan fase 4 ini telah berusaha mengambil pendekatan berbasis pasar yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan CBF (Nugroho, 2020). MFP fase 4 bekerja dengan cara tersebut agar komunitas yang dikembangkan akan dibutuhkan pasar dan sesuai kebutuhan pasar sehingga mendapatkan harga yang bagus.

Berikut Faktor pendorong Inggris dalam membentuk kerjasama ini melalui skema *Multistakeholder Forestry Programme*:

FAKTOR INTERNAL

Industri kehutanan pemerintah Inggris diatur oleh *Timber Trade Federation* dalam mengatasi berbagai isu sentral pada pasar kayu Inggris. *Timber Trade Federation* selaku asosiasi perdagangan kayu terkemuka di Inggris mewakili pandangan industri kehutanan pemerintah dan meningkatkan reputasi kayu yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Inggris memang memiliki pasokan domestiknya sendiri yang terus berkembang, namun 67% dari semua produk kayu yang dikonsumsi di Inggris diperoleh berdasarkan impor. Inggris memanfaatkan kayu sebagai tujuan untuk menghasilkan furniture, serta bagian lainnya dapat diolah dan diproduksi sebagai bahan bakar yang hemat energi. Inggris mengimpor kayu tropis dan produk furniture kayu dengan nilai total USD419 juta dalam empat bulan pertama tahun 2021, yang mana meningkat 18% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (FII, 2021). Kendati demikian, Nick Boulton selaku manajer perdagangan TTF melaporkan bahwa pasar Inggris saat ini berada di level terendah dimana pada triwulan ke-3 tahun 2021 diperkirakan tidak akan ada pasokan kayu yang cukup untuk memenuhi permintaan kayu struktural Inggris, artinya Inggris mengalami situasi yang memburuk secara terhadap pasokan kayu (PBC, 2020). Melihat pernyataan tersebut Inggris mengalami kekurangan

akan ketersediaan kayu solid. Kondisi ini membuktikan bahwa Inggris sangat bergantung pada sektor impor untuk pemanfaatan kayu domestiknya. Inggris merupakan negara perdagangan yang independent, dimana mengambil pendekatan yang pro-perdagangan, mengarah pada peluang serta pertumbuhan (EkonomiBisnis, 2021). Inggris pun kembali menegaskan bahwa komitmennya terhadap kawasan Indo-Pasifik sebagai mesin ekonomi global dan Indonesia merupakan jantung dari visi tersebut. Langkah ini dilakukan Inggris sebab Indonesia memiliki kesamaan minat untuk memperdalam hubungan perdagangan maupun kerja sama dalam berbagai sektor, seperti kayu, energi terbarukan, bahkan pertahanan. Hal ini kemudian Indonesia merupakan pasar yang cukup besar untuk kayu dan produk kayu. Impor kayu dari Indonesia ke Inggris melonjak dari Maret tahun ini hingga pada bulan April, tercatat sebesar USD46 juta pada empat bulan pertama tahun 2021 (FII, 2021). Melalui pandangan Realisme Neoklasik yang menyebutkan bahwa dalam menentukan tingkah laku negara, struktur domestik menjadi hal yang paling signifikan untuk dipertimbangkan dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Maka, langkah yang dilakukan oleh Inggris dalam merespons peningkatan kebutuhan pasokan kayu domestiknya adalah membentuk kerjasama bersama Indonesia. Kerjasama yang dilakukan Inggris dengan membentuk program kehutanan melalui *Multistakeholder Forestry Programme* sebagai langkah agar Inggris terus memasok kebutuhan domestik kayunya.

Kondisi internal Inggris telah didukung oleh persepsi elite politik, Nick Boulton selaku Manajer Perdagangan *Timber Trade Federation*. TTF mendesak untuk mempertimbangkan tindakan bekerja sama dengan produsen kayu dan sefleksibel mungkin komunikasi lanjut dengan pemasok kayu mengenai spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan untuk mengurangi kekurangan kayu. Dengan demikian, seperti yang telah dikemukakan oleh Gideon Rose (1998) persepsi pemimpin maupun para elite politik pemerintahan menjadi level unit yang berperan sebagai *intervening variable*. Artinya, persepsi yang dikemukakan oleh pemimpin TTF mendorong terciptanya suatu regulasi agar dapat memenuhi pasokan kayu yang semakin menipis. Akibat adanya tekanan tersebut membuat Inggris membentuk kebijakan luar negeri untuk mengimpor kayu yang berasal dari Indonesia. Lebih dari itu, saat penandatanganan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia dan Inggris, Duta Besar Inggris untuk Indonesia yakni Moazzam Malik menyatakan:

“Industri per kayu menjadi aspek yang sangat penting bagi perekonomian di Inggris, begitupun sebaliknya bagi Indonesia. Inggris menyadari jika industri kayu ini sangatlah besar, hal ini ditinjau dari skala nilai ekspor kayu yang telah tersertifikasi legal dari Indonesia ke Inggris hingga mencapai US \$ 12 miliar per tahunnya.” (MENLHK, 2019).

Dari pernyataan tersebut, Inggris akan terus mendampingi Indonesia dengan mengelola sumber daya hutannya akibat dari industri kayu yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Inggris. Mekanisme ini juga menjamin kemudahan operasionalnya untuk menyepakati kebutuhan kayu sesuai yang diminta oleh Inggris agar dapat memenuhi persediaan kayu domestiknya. Melihat permintaan domestik kayu Inggris yang semakin meningkat, mendorong Inggris untuk melakukan kerjasama guna memenuhi ketersediaan kayu domestik. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, kerjasama ini dapat meningkatkan *value* kayu Indonesia secara ekonomi sesuai dengan

kebijakan Inggris, dan Inggris pun juga dapat mendapatkannya secara legal dan mudah. Dalam hal ini, Inggris berupaya melakukan diplomasi yang berfungsi untuk mempengaruhi Indonesia agar sesuai dengan kepentingan Inggris sendiri. Inggris sendiri sangat rasional, dimana Inggris mencoba untuk konsisten dengan menggunakan regulasi lingkungan agar Inggris dapat menyesuaikan permintaan pasokan kayu sesuai yang dibutuhkan oleh Inggris.

FAKTOR EKSTERNAL

Disisi lain, pengaruh kondisi eksternal dipengaruhi ketika Inggris yang relative proaktif dalam permasalahan habitat hutan dan ingin memastikan bahwa kayu berkualitas tinggi tetap menjadi bagian penting dari rantai pasokan industri Inggris. Inggris mengumumkan rencana peluncuran Undang-undang untuk membersihkan rantai pasokan kayu bebas dari Ilegal sambil menekan laju deforestasi (TTF, 2022). Hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah Inggris untuk setidaknya pengurangan 60% emisi gas rumah kaca dari baseline tahun 1990 pada tahun 2050 (Waite, 2007). Dengan demikian, Inggris juga mulai berhati-hati dalam membeli produk kayu karena adanya kekhawatiran kayu tersebut didapat dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan premis dasar Realisme Neoklasik yang menitikberatkan terhadap posisi negara dalam sistem internasional dan menjadi faktor yang paling menentukan perilaku suatu negara (Rose, 1998). Bagi Inggris, jika dirinya membentuk kerjasama ini juga akan berdampak kembali untuk negaranya. Di setiap tahapnya, MFP telah memberikan finansial dan teknis kepada Indonesia untuk menangani persoalan produksi kayu legal demi mitigasi perubahan iklim serta mengatasi adanya *Illegal Logging*. Telah disebutkan di dalam perjanjian MFP fase 4, bahwa fase ini melakukan tindakan kooperatif ditujukan untuk meningkatkan akses komunitas dan meningkatkan konservasi terhadap sumber daya hutan di Indonesia. Oleh sebab itu, jika dilihat dari sisi eksternal kerjasama ini guna meminimalisir dilemma keamanan yang dialami oleh Inggris. Karena pada dasarnya kayu *Illegal* dapat mengancam keamanan nasional negara Inggris. Kerjasama ini juga akan memberikan manfaat bagi Inggris agar Indonesia menghasilkan kayu yang legal serta aman yang dapat masuk ke Inggris.

Sejak terbentuknya Protokol Kyoto, Inggris pun turut terlibat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara yang meratifikasi Protokol Kyoto telah berkomitmen dan bekerjasama guna menahan laju peningkatan emisi gas rumah kaca. Keputusan ini dilakukan sebab suhu di Inggris telah meningkat sejak masa pra-industri dengan laju sekitar 0,25°C per dekade sejak 1960-an (Vardoulakis, 2015). Inggris pun turut serta meratifikasi Perjanjian Paris sebagai perpanjangan dari Protokol Kyoto, dimana perjanjian tersebut berupaya mempengaruhi negara-negara agar turut mengikat dan andil dalam menjaga lingkungan. Komitmen Inggris agar mengawal negara-negara untuk membatasi pemanasan global, dimana mengurangi risiko setidaknya 1,5 derajat Celcius (CNN, 2015).

Peraturan Kayu dari Uni Eropa membuat pemerintah Inggris telah menghentikan bisnis penggunaan komoditas yang terkait dengan illegal maupun bisnis yang harus lebih transparan tentang dari mana mereka mendapatkan produk mereka. Peraturan ini juga diterapkan di Inggris melalui Peraturan dan Produk Kayu (Menempatkan di Pasar) tahun 2013. Bahkan, telah ditetapkan sah oleh Indonesia melalui Perpres No. 21 tahun 2014 (Maryudi, 2016). Hal ini menjadi pedoman langkah yang dilakukan Inggris untuk menjalin kesepakatan kerjasama dengan membentuk aliansi bersama Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran karena adanya peningkatan gas emisi karbondioksida di dalam

sistem internasional. Terlebih, TTF mengungkapkan bahwa Inggris meningkatkan komunikasi akan manfaat kayu tropis berlisensi FLEGT (TTF, 2021). Langkah ini bertujuan sebagai metode penggunaan kayu yang berkelanjutan dan pengelolaan hutan lestari menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 (*Climate Change Conference of the Parties*) (Haugh, 2021). COP26 menjadi konferensi yang membahas tantangan perubahan iklim, dihadiri oleh para delegasi pemimpin dunia dimana acara ini dipimpin oleh pejabat Inggris yakni Alok Sharma. Dalam pidatonya, Sharma mengungkapkan Inggris tetap menjadi Presiden COP yang berambisi tinggi untuk mengakhiri deforestasi. Berdasarkan analisis pemikiran Realisme Neoklasik, kekuatan Inggris dalam atensinya adalah untuk patuh terhadap lingkungan dimana sangat menentukan perilakunya dalam sistem internasional untuk kemudian arah kebijakan luar negerinya. Manajemen Lingkungan dan kebijakan sumber daya alam menjadi komponen penting dari strategi kerjasama luar negeri pembangunan Inggris untuk membangun citra Inggris dalam panggung internasional. Inggris menjadi negara yang memiliki peranan penting dalam tatanan dunia untuk menunjukkan pengaruh serta komitmennya dalam perubahan iklim, yang mana perhatian tersebut ditujukan dalam dunia hubungan internasional dengan menjadi pemimpin global Konferensi iklim COP26 (GOV.UK, 2018).

Alok Sharma juga menuturkan bahwa konferensi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam proses energi yang bersih, melalui kemitraan yang akan mendukung tujuan ambisius mereka (GOV.UK, 2022). Inggris mendukung seruan dari negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan mendesak para pemimpin dunia untuk menyelamatkan perubahan iklim. Inggris berusaha memberikan pengaruh andil besar pada isu *Climate Change* hingga membuat Inggris berambisi besar dalam posisinya pada kesepakatan maupun konferensi perubahan iklim. Politik luar negeri Inggris dalam bidang politik sebagai upaya Inggris untuk mempertahankan citra dan eksistensinya di dunia Internasional. Hal ini juga dapat terbukti dari proyek FLEGT yang direncanakan TTF dengan menuliskan bahwa TTF bekerja membimbing para audiens serta peningkatan promosi FLEGT di cakupan Inggris (FII, 2021). Proyek tersebut menjadi rencana TTF untuk pembuatan program komunikasi yang lebih luas dalam mengembangkan manifesto agenda kayu tropis bersama. Melihat dorongan faktor eksternal, Inggris berusaha membentuk suatu aliansi dengan Indonesia guna menurunkan emisi karbon secara signifikan. Minat Inggris terhadap impor kayu tidak menutup Inggris untuk terus memainkan peran penting dalam mencapai target untuk terus meningkatkan pengawasan emisi dan mengikuti proses bersertifikat mengukur karbon yang terkandung pada kayu-kayu yang masuk ke Inggris (CIOB, 2015). Sesuai analisis dari Realisme Neoklasik menyatakan dalam menentukan kebijakan luar negeri sebuah negara mencari keamanan dengan mencari kontrol dan memperkuat pengaruh di lingkungan eksternal. Hal tersebut dapat dilihat usaha Inggris tersebut untuk mempertahankan pengaruh negaranya dan menunjukkan citranya dalam struktur internasional dengan menimbang tekanan-tekanan yang muncul dari segi eksternal demi mendapatkan tujuan yang disesuaikan kebutuhan negaranya sendiri. Negara akan berupaya mengontrol dan membentuk lingkungan eksternal mereka sendiri agar tercipta keamanan untuk merespon ketidakpastian dari anarki internasional. Maka, Inggris membentuk suatu kesepakatan agar dapat meminimalisir kekhawatiran tersebut dengan menjalin aliansi dengan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Alok Sharma dengan Menko Perekonomian RI membahas mengenai kolaborasi dan kerja sama dalam komitmen untuk menghentikan dampak buruk perubahan iklim pada perencanaan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan. Inggris pun mencoba memperkuat dialog bersama

Indonesia dengan menggerakkan kemampuannya untuk berbagi visi dan tindakan menuju pengelolaan berkelanjutan pada sektor kehutanan (Detik.com, 2021). Lebih dari itu, investigasi *Greenpeace* pada tahun 2003 menyatakan bahwa adanya indikasi Inggris menggunakan kayu yang ditebang dari Indonesia secara legal. Sejak saat itu, pemerintah Inggris berjanji untuk tidak membeli kayu yang ditebang secara illegal maupun menghentikan seluruh impor kayu bila tidak ada jaminan kayu itu ditebang secara resmi.

MFP fase 4 berulang kali menjuk pada FLEGT-VPA dalam SVLK yang dibentuk Uni Eropa menjadi pondasi hukum perjanjian kerjasama kehutanan yang terjalin dengan Inggris-Indonesia. Maka, Inggris tergerak untuk memberikan dukungan finansial dan teknis agar kelangsungan produk kayu legal berkelanjutan terjalin di Indonesia, sembari Inggris terus mendorong ekspor kayu Indonesia ke negaranya. Sejauh ini, Inggris pun masih tetap memberlakukan adopsi VPA-FLEGT walaupun telah melepaskan diri dari keanggotaan Uni Eropa. Fakta menunjukkan bahwa pasca Brexit, Inggris sendiri telah menegaskan akan meneruskan kebijakan FLEGT-VPA. Kebutuhan Inggris akan kayu yang tinggi diikuti dengan kesadaran lingkungan yang tinggi mendesak Inggris membuat program MFP serta memanfaatkan rezim VPA-FLEGT. Hal tersebut membuktikan bahwa Inggris mempunyai kepentingan besar untuk memperoleh kayu-kayu berasal dari Indonesia melalui perdagangan produk kayu yang telah memiliki sertifikat. Dengan demikian, pembentukan kerjasama ini menjadi langkah yang dilakukan Inggris untuk pengelolaan hutan di Indonesia sesuai dengan kebijakan Inggris, yang juga diharapkan menghasilkan kayu yang legal dan aman untuk digunakan oleh Inggris.

KESIMPULAN

Program kerjasama kehutanan *Multistakeholder Forestry Programme* menjadi salah satu kebijakan luar negeri yang dirancang oleh Inggris dalam meningkatkan tata kelola hutan di Indonesia. Inggris tergerak untuk bekerjasama dengan Indonesia melalui MFP agar Inggris juga dapat mengimpor kayu Indonesia. Kerjasama MFP menjadi langkah yang diberikan Inggris melalui *United Kingdom Department for International Development* (UK-DFID) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan dapat menghasilkan kayu yang legal dan aman agar dapat digunakan oleh Inggris. Inggris membentuk program MFP agar dapat mengatasi dilema keamanan tanpa mengganggu kepentingan nasionalnya. Inggris berusaha memberikan pengaruh dengan meningkatkan tata kelola hutan Indonesia terbebas dari *Illegal Logging* agar dapat menjamin kayu yang legal dan aman bagi negaranya.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Inggris membentuk kerjasama MFP didasari oleh pemikiran Realisme Neoklasik dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal. Dapat dilihat dari sisi internal, *Timber Trade Federation* selaku federasi perdagangan kayu di Inggris menyatakan bahwa ketersediaan kayu semakin menipis hingga Inggris tidak dapat memenuhi permintaan kayu domestiknya. Sedangkan pada faktor eksternal, Inggris sangat memfokuskan atensinya terhadap isu lingkungan, dimana munculnya *Illegal Logging* di Indonesia menyebabkan kekhawatiran Inggris akan impor kayu dari Indonesia yang masuk ke negaranya. Hal ini tentu akan mengancam keamanan Inggris jika mengonsumsi produk kayu dari hasil illegal dan mempengaruhi citranya untuk mengatasi perubahan iklim secara global.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si dan Bapak Marten Hanura, S.I.P., M.P.S selaku Dosen

Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran selalu meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan atas penyusunan skripsi hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan arahan agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik.

REFERENSI

- Buongiorno, J. J. (2017). An assessment of gains and losses from international trade in the forest sector. doi: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.04.004>
- CIOB. (2015). *UK construction can't see the wood for the trees*. Retrieved from: <https://constructionmanagement.co.uk/we-cant-see-wood-trees/>
- CNN. (2015). *Obama: Climate agreement 'best chance we have' to save the planet*. Retrieved from: <https://edition.cnn.com/2015/12/12/world/global-climate-change-conference-vote/>
- Commission, F. (2020). *Forestry Facts and Figures* (Vol. ISBN 9780855389147.). Retrieved from: <https://www.forestresearch.gov.uk/documents/7806/CompleteFS2020.pdf>
- Detik.com. (2021). *Airlangga: Inggris Akui RI Komitmen Terapkan Pertanian Berkelanjutan*. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-5589994/airlangga-inggris-akui-ri-komitmen-terapkan-pertanian-berkelanjutan>
- DitjenPHLHK. (2021). *Laporan Tahunan Ditjen PHLHK tahun 2021*. Retrieved from: http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laptah_Ditjen_PHLHK_2021.pdf
- FII. (2021). *UK Tropical Wood Import Value in April at Highest Level Since 2008-09 Financial Crises. ITTO European Market Report 30th June 2021*. Retrieved from <https://forestindustries.info/uk-tropical-wood-imports-recover-ground-despite-supply-challenges-itto-european-market-report-15th-may-2021>
- FORDA. (2011). *Indonesia - Inggris Perpanjang Kerjasama MFP Sampai 2016*. Retrieved from <https://www.forda-mof.org/berita/post/662-indonesia--inggris-perpanjang-kerjasama-mfp-sampai-2016>
- GOV.UK. (2022). *Alok Sharma speech to mark six months since COP26*. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/speeches/alok-sharma-speech-to-mark-six-months-since-cop26>
- GOV.UK. (2022). *Alok Sharma, COP26 President, to visit South Africa to reinforce support for a just energy transition*. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/news/alok-sharma-cop26-president-to-visit-south-africa-to-reinforce-support-for-a-just-energy-transition>
- KEMLU. (2020). *Produk Kayu Sustainable Indonesia Semakin Dipercaya di Inggris*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/london/id/news/8718/produk-kayu-sustainable-indonesia-semakin-dipercaya-di-inggris>
- KLHK. (2018). *Indonesia - Inggris Perpanjang Kerjasama Perdagangan Kayu Ramah Lingkungan Dan Perhutanan Sosial*. Retrieved from http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1477#
- MENLHK. (2019). *RI-Inggris Tandatangani Kemitraan Sukarela FLEGT*. Retrieved from <https://dataalam.menlhk.go.id/berita/2019/03/29/ri-inggris-tandatangani-kemitraan-sukarela-flegt>
- MFP. (2000). Retrieved from <http://mfp.or.id/index.php/id/tentang-kami>

- Nugroho, T. (2020). Tri Nugroho Bicara tentang Pendekatan dan Strategi MFP 4. Youtube.
- Office, F. C. (2018). *International Climate Finance*. Retrieved from <https://www.gov.uk/guidance/international-climate-finance>
- PBC. (2020). *Timber industry warns of major shortages in Q3 2021*. Retrieved from <https://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/timber-shortages-worsen/94148/>
- Rose, G. (1998). *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*. World Politics, vol. 51, no. 1, United Kingdom : Cambridge University Press, pp. 146-147.
- TTF. (2022). *UK GOVERNMENT PROPOSAL ON ILLEGAL DEFORESTATION*. Retrieved from <https://ttf.co.uk/uk-government-proposal-on-illegal-deforestation/>